KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PIDANA

Nomor SOP	:	AHU-153.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM PIDANA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Sarjana Hukum dan Analis Hukum Muda 3. Mampu memahami teknik pemberian pendapat hukum 4. Mampu memahami hukum pidana dan menganalisa hukum pidana 5. Mampu memahami teknologi dan aplikasi 6. Memiliki etika dan kedisiplinan
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pengolahan Data	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM PIDANA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Direktur Pidana	Ketua Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Pendapat hukum pidana secara online dengan mengakses laman www.ahu.go.id, memilih Menu Layanan Pendapat Hukum dan Keterangan Ahli Hukum Pidana, kemudian mengisi Form registrasi serta mengunggah surat permohonan.				Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan persyaratan telah diunggah ke dalam aplikasi	
2	Menerima dan mendisposisikan surat permohonan pendapat hukum pidana dari individu peorangan, masyarakat/ instansi				Dokumen permohonan	2 hari kerja	Dokumen permohonan Pendapat Hukum	
3	Menerima disposisi, meneliti dan menelaah surat permohonan pendapat hukum pidana dari individu peorangan, masyarakat/ instansi bersama anggota tim dan mencari bahan serta data dukung permohonan pendapat hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				Dokumen permohonan	7 hari kerja	Dokumen Permohonan, data dukung dan bahan	SOP Pengolahan bahan dan data
4	Memeriksa dan memberi persetujuan pada konsep surat pendapat hukum pidana, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Tim Analis Hukum				Data dukung dan bahan Dokumen hasil analisa data dan dokumen draft surat pendapat hukum pidana	3 hari kerja	Dokumen hasil analisa data dan dokumen draft surat pendapat hukum pidana	
5	Menerima surat jawaban pendapat hukum pidana				Surat pendapat hukum pidana	1 hari kerja	Surat pendapat hukum pidana	

